

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab *al-Risālah*)

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah as a Source of Law (al-Syāfi'ī's Opinion Analysis Study in Book of al-Risālah)

Rahmayani^a, Muttazimah^b, Nuraisyah Syahrūn^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar; Email: rahmayani@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar; Email: muttazimah@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar; Email: aisyahsy372@gmail.com

Article Info

Received: 5 February 2024

Revised: 26 February 2024

Accepted: 26 February 2024

Published: 8 March 2024

Keywords:

Sources of Law, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, *al-Syāfi'ī*, *al-Risālah*

Kata kunci:

Sumber Hukum, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, *al-Syāfi'ī*, *al-Risālah*

Abstract

Many classical and contemporary scholars use *al-Maṣlaḥah al-mursalah* as a source or method of adopting Islamic law on issues that have not been explained in detail in the texts, whether in the *Al-Qur'an* or *hadith*. The aim of the research is to find out the views of Imam al-Syāfi'ī regarding the position of *al-maṣlaḥah al-mursalah* as a source of law and his opinion about *al-maṣlaḥah al-mursalah* as a source of law in the book *al-Risālah*. The formulation of the problem raised is; First, what is Imam al-Syāfi'ī's view regarding the position of *al-maṣlaḥah al-mursalah* as a source of law. Second, what is Imam al-Syāfi'ī's opinion in the book *al-Risālah* regarding *al-maṣlaḥah al-mursalah* as a source of law. Researchers use qualitative research with library research methods which focus on the study of manuscripts and texts, using normative and conceptual approach methods. The results can be concluded as follows; Firstly, Imam al-Syāfi'ī does not reject *al-maṣlaḥah al-mursalah* absolutely, but he considers that the use of this method must be based on several conditions. This opinion is strengthened by the opinion of the scholars of the Second Syāfi'ī school, the results of the researcher's analysis of *al-maṣlaḥah al-mursalah* as a source of law in the book *al-Risālah*, that Imam al-Syāfi'ī does not mention the rejection or permissibility of blaspheming with methods or sources. It is hoped that the implications of this research will be a reference for a *mujtahid* when he wants to establish a law using the *al-maṣlaḥah al-mursalah* method.

Abstrak

Banyak ulama klasik hingga kontemporer yang menggunakan *al-Maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber atau metode pengambilan hukum Islam pada permasalahan yang belum dijelaskan secara terperinci dalam nas baik itu *Al-Qur'an* atau *hadis*. Tujuan penelitian untuk mengetahui pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang kedudukan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum dan pendapat beliau tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum dalam kitab *al-risālah*. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu; pertama, bagaimana pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang kedudukan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum. Kedua, bagaimana pendapat Imam al-Syāfi'ī dalam kitab *al-Risālah* tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library researc*) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual. Hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut; pertama, Imam al-Syāfi'ī tidak

menolak *al-maṣlaḥah al-mursalāh* secara mutlak, akan tetapi beliau memandang bahwa penggunaan metode ini harus berdasarkan atas beberapa syarat. Pendapat ini dikuatkan atas pendapat ulama-ulama mazhab Syāfi'ī *Kedua*, Hasil analisa peneliti tentang *al-maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai sumber hukum dalam kitab *al-Risālah*, bahwa Imam al-Syāfi'ī tidak menyebutkan penolakan ataupun pembolehan berhujah dengan metode atau sumber tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi seorang mujtahid ketika ingin menetapkan sebuah hukum dengan metode *al-maṣlaḥah al-mursalāh*.

How to cite:

Rahmayani, Muttazimah, Nuraisyah Syahrūn, "Al-Maṣlaḥah al-Mursalāh sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2 (2024): 128-141. doi: 10.36701/qiblah.v3i2.1365.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama dan sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama. Adapun Abu Islam Muṣṭafa bin Muḥammad bin Salamah dalam kitabnya *al-Ta'sīs fī Uṣūl al-Fiqh 'ala Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* membagi sumber hukum Islam menjadi tiga bagian, sumber hukum yang pertama adalah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., dan yang kedua adalah sumber hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama, yaitu *ijma'* dan *kias*. Adapun yang ketiga adalah sumber hukum yang belum disepakati oleh para ulama, yaitu *qaulu ṣahābi*, *syar'u man qablanā*, *al-iṣṭiṣḥab al-'adam*, *al-iṣṭiṣḥab al-hukmu al-sābiq*, *al-iṣṭiṣḥab/al-maṣlaḥah al-mursalāh*, *al-u'rf*, *al-hīlah*, dan *saddun li ḥarā'i*.¹ Salah satu sumber hukum yang belum disepakati adalah *al-maṣlaḥah al-mursalāh* yang mana ini merupakan sumber ataupun metode yang sangat tepat dalam menyikapi, serta memberikan solusi ketika terjadi persoalan yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, sahabat, dan para ulama salaf.²

Syaikh Abdul Wahab Khalaf menuliskan pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalāh* adalah kebaikan yang belum dijelaskan oleh syariat sebagai hukum yang dapat direalisasikan dan tidak ada dalil yang mendukungnya ataupun menolaknya. Contoh para sahabat menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai metode *istinbāṭ* dalam pensyariaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan hak milik pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, serta ada maslahat yang diadakan berdasarkan kebutuhan, keperluan dan kebaikan yang belum ditetapkan oleh syariat pembolehan ataupun penolakannya.³

¹Abi Islam Muṣṭafa bin Muḥammad bin Salamah, *al-Ta'sīs fī Uṣūl al-Fiqh 'ala Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. V; Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1428/2007), h. 78.

²Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "al-Maṣlaḥah al-Mursalāh dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no.1 (2018): h. 2.

³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VII; t.t.: Maktabah al-Da'wah, 1431 H/ 2010 M), h. 84

Yang menjadi objek *al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu peristiwa yang butuh penjelasan tentang hukumnya, yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi saw. yang menjadi dasar hukumnya.⁴ Sebagaimana kebutuhan masa kini ataupun kejadian-kejadian yang membutuhkan penjabaran hukum, sebagaimana yang terjadi pada pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak hukum yang perlu dijelaskan ulang dengan melihat dari maslahat dan mudarat yang ada, misalnya hukum salat berjarak, hukum salat di rumah bagi laki-laki dan masih banyak lagi. Demikian pula masalah kontemporer yang sangat dibutuhkan pada kehidupan masa kini.

Ulama memandang bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* masuk dalam bab mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan maka mereka menjadikannya sebagai dalil yang dapat dijadikan sebagai hujah, dan siapa yang memandang bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* masuk dalam bab menempatkan syariat dengan *ra'yu* dan menetapkan hukum dengan akal dan hawa nafsu. Maka dikatakan sesungguhnya itu bukan termasuk sumber hukum Islam dan tidak dapat berhujah dengannya serta tidak mengambil sesuatu darinya.⁵

Mazhab Hanābilah yang menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum, adapun mazhab Hanāfiyah, Syāfi'iyah serta Zāhiriyyah menolak *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Tapi pada asalnya yang menolak secara mutlak adalah mazhab Zāhiriyyah, adapun Mazhab Hanāfiyah dan Syāfi'iyah keduanya tidak menolak *al-maṣlaḥah al-mursalah* secara mutlak. Akan tetapi mereka memasukkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* pada metode atau sumber pengambilan hukum lainnya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memasukkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam *al-istihsan*.⁶ Adapun mazhab Syāfi'iyah memasukkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam bab *kias* sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Gazālī dalam kitabnya *al-Mustaṣfā min al-Ilmi al-Uṣūl*.⁷ Imam al-Syanqīṭī mengatakan, sebenarnya seluruh ahli mazhab beramal dengan *al-maṣlaḥah al-murasalah* walaupun mereka telah menyatakan bahwa itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah.⁸ Akan tetapi belum ada penjelasan yang menyebutkan secara terperinci bahwa Imam Syāfi'ī yang merupakan pencetus pertama ilmu usul fikih. Yang mana karya pertama beliau adalah kitab *al-Risalah*, yang menjadi rujukan utama bagi para ahli usul fikih pada masa setelahnya hingga masa sekarang, menjelaskan bahwa beliau betul-betul tidak menolak *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; pertama, Bagaimana pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum? Kedua, Bagaimana pendapat Imam al-Syāfi'ī tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum dalam kitab *al-Risālah*?. Adapun tujuannya adalah; pertama, Untuk mengetahui pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber

⁴Purwanto, "Konsep Maṣlaḥah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin al-Tufi", *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2018), h. 2.

⁵Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahlu Sunnah wa al-Jamā'ah* (Cet. XII; Damam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1439 H/2018 M), h. 237.

⁶Mukhsin Nyak Umar, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah: Kajian atas Relesansinya dengan Pemabaharuan Hukum Islam* (Cet. I; Banda Aceh: Turats 1438 H/ 2017 M), h. 150.

⁷Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī al-Ṭausī, *al-Mustaṣfā min al-'Ilmī al-Uṣūl* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1413 H/1993 M), h. 173-175.

⁸Musthafa bin Muhammad Salamah, *al-Ta'is Fi Uṣūl al-Fiqh 'ala Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. V; Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1428 H/ 2007 M), h. 445.

hukum. Kedua, Untuk menganalisis pendapat Imam al-Syāfi'ī tentang *al-mashlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum dalam kitab *al-Risālah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non statistik) yaitu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*Library Research*) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual.⁹ Pada penelitian kualitatif, metode pengumpulan data mencakup penjelasan tentang teknik yang digunakan dalam pengumpulan data.¹⁰ Dengan mengumpulkan data yang ada dari sumber-sumber yang telah disebutkan penulis dapat menjelaskan dan menganalisa pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum terkhusus pendapat beliau dalam kitab *al-Risālah*. Pendekatan ini lebih menekankan aspek normatif yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis juga pemikiran tokoh atau ulama dalam memandang hukum *al-maṣlahah al-mursalah* baik secara umum maupun secara khusus. Adapun pendekatan konseptual untuk mengetahui dan menganalisa pendapat Imam al-Syāfi'ī dalam kitab *al-Risālah* tentang *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum, yang mana pada kitab *al-Risālah* tidak disebutkan secara khusus bab tentang *al-maṣlahah al-mursalah*.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul; “Konsep *Maṣlahah Mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin al-Tūfi” yang ditulis oleh Purwanto Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.¹¹ Peneliti menuliskan dalam skripsinya tentang kedudukan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum dengan fokus pada pendapat Najmuddin al-Tūfi atas permasalahan tersebut. Adapun yang akan penulis teliti berfokus pada pendapat *al-Syāfi'ī*.
2. Jurnal yang berjudul; “Pemikiran Imam al-Syāfi'ī Tentang Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum” yang ditulis oleh Aris dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.¹² Hasil penelitian ini menjelaskan biografi singkat Imam al-Syāfi'ī serta menjabarkan pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum dalam penetapan hukum Islam. Sedang penelitian ini berfokus pada analisis pendapat Imam al-Syāfi'ī dalam kitab *al-Risālah*.
3. Jurnal yang berjudul: “Perdebatan *Maṣlahah Mursalah* dalam kitab-kitab al-Imam al-Gazālī” yang ditulis oleh Muḥammad Hadi Sucipto Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹³ Persoalan yang diangkat dalam jurnal ini mengenai pendapat Imam al-Gazālī tentang *al-maṣlahah al-mursalah* dari tiga kitab yang telah beliau tulis, yaitu kitab *al-Mankhul*, *Syifā' al-Galil*, dan *al-Mustaṣfa*. Pendapat beliau tentang *al-maṣlahah al-mursalah* dari tiga kitab tersebut beliau memiliki pendapat berbeda pada setiap kitabnya. Penelitian ini membahas tentang pendapat Imam al-Gazālī yang

⁹Imam Suprayogo dan dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Posda Karya, 2011), h.30.

¹⁰Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2022), h. 29.

¹¹Purwanto, “Konsep *Maṣlahah Mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Najmuddin at-Tufi”.

¹²Aris, “Pemikiran Imam Syāfi'ī tentang Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* sebagai Sumber Hukum” *Hukum Dikum* 11, no. 11 (2013).

¹³Mohammad Hadi Sucipto, “Perdebatan *Maṣlahah Mursalah* dalam Kitab-Kitab Imam al-Ghazali” *Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).

merupakan pengikut mazhab *Syāfi'iyah* adapun penulis fokus pada penelitian pendapat al-Syāfi'ī.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, sebagian besar peneliti hanya meneliti *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum secara umum, dan belum ada yang meneliti pendapat Imam al-Syāfi'ī secara terperinci dalam kitabnya *al-Risālah*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa fokus pembahasan dalam skripsi yang berjudul “*al-Maṣlahah al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab *al-Risālah*)” adalah karya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga penting untuk mengangkat tema ini dalam karya ilmiah. Penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan terkait dengan metode *istinbat* hukum terutama dalam *al-maṣlahah al-mursalah*, serta memperluas pengetahuan tentang konsep *al-maṣlahah al-mursalah* secara umum terkhusus pada pendapat Imam al-Syāfi'ī. Adapun pembahasannya sebagai berikut.

A. Pengertian *al-Maṣlahah al-Mursalah*

1. Secara Etimologi

Kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan *masdar* dari kata صلح dan merupakan bentuk *mufrad* dari kata¹⁵ yang bermakna kebaikan atau manfaat.¹⁴ مصالِح *maṣlahah* juga sering disebut dengan الاستصلاح yang artinya mencari yang baik.¹⁶ al-Fairuz Ābādī berkata “*al-maṣlahah* adalah bentuk *mufrad* dari المصالح dan *istiṣlah* bermakna menghilangkan keburukan”. Dalam *Tāj al-Lughah* adalah lawan dari keburukan, yang berarti memperbaiki sesuatu dengan perbaikan yang sangat baik.¹⁷ *Al-Mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il māḍi* (kata kerja lampau), yaitu رسل. Apabila ditambahkan huruf hamzah di pangkalnya maka menjadi أرسل yang bermakna terlepas atau bebas. Kata terlepas dan bebas apabila digabungkan dengan kata *maṣlahah* diartikan “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan.”¹⁸

2. Secara Terminologi

Al-Maṣlahah al-mursalah adalah tujuan dari syariat yaitu memberikan manfaat kepada seorang hamba yang dapat menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, hartanya dan nasabnya. Serta apapun yang mengandung penjagaan dari kelima hal tersebut dan setiap sebab yang menghilangkan kelima usul tersebut atau salah satunya adalah *mafsadah*, dengan demikian menjaga kelima usul tersebut merupakan sebuah *maṣlahah*.¹⁹ Imam al-

¹⁴Jamāluddīn Muḥammad bin Mukram Ibnu Manẓūr al-Afrīqī, *Lisān al-Arab*, Juz 2 (Cet. III; t.t.: Nasyru Adabi al-Hauzah, 1405 H/1984 M), h. 516.

¹⁵Ibrāhīm Mustafā, dkk., *Mu'jam Al-Wasīṭ* (t.t.: Dār al-Da'wah, 1431 H/2010 M) h. 520.

¹⁶Purwanto, “Konsep *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran al-Ṭūfī”, *Skripsi*, h. 15.

¹⁷Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah wa Asaruhā fī al-Mu'āmalāt* (Cet. I; Saudi Arabia: Dār Kanūz Isybilīyā, 1431 H/2010 H), h. 48.

¹⁸Purwanto, “Konsep *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Al-Ṭūfī”, *Skripsi*, h. 14-15.

¹⁹Abdu al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad Al-Namlah, *Al-Muḥaḍḍab fī 'Ilmi Uṣūl Al-Fiqh Al-Muqāran* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Al-Rusyd, 1420 H/ 1999 M), h. 46.

Gazālī yang merupakan ulama mazhab *Syāfi'iyah* memberikan pengertian bahwa *al-maṣalāḥ al-mursalāh* dalam kitabnya *al-Mankhūl* adalah dalil yang tidak ada hukum yang menjelaskannya dalam syariat beliau menyebutnya dengan *al-istidlāl*. Pengertian *al-maṣalāḥ al-mursalāh* dapat disimpulkan bahwa makna *al-maṣalāḥ al-mursalāh* adalah apa yang belum disebutkan hukum pembolehan dan penolakannya oleh syariat, yang dapat mendatangkan manfaat serta apa yang dapat menjaga manusia dari keburukan, yang sejalan dengan syariat.

B. Pembagian *al-Maṣalāḥ al-Mursalāh*

Berdasarkan pembagian yang dikemukakan oleh ulama usul fikih dalam kitab-kitabnya, *al-maṣalāḥ* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:

1. *Al-Maṣalāḥ* dari segi kekhususan dan keumumannya

Ulama membagi *al-maṣalāḥ* dari segi keumuman dan kekhususannya sebagai berikut:

- Maṣalāḥ al-'ammah* adalah kemaslahatan umum yang bersangkutan dengan kepentingan manusia secara umum. Kemaslahatan tersebut tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi merupakan kepentingan mayoritas umat.
- Maṣalāḥ al-khāṣṣah* adalah maslahat yang menyangkut individu setiap orang, dan sangat jarang sekali terjadi pada umat manusia. Sebagai contohnya pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).²⁰

2. *Al-Maṣalāḥ* dari segi keberadaannya dalam syariat

Al-Maṣalāḥ dari segi keberadaannya disebutkan oleh Imam al-Gazālī dalam kitabnya *al-Mustaṣfā*,²¹ 'Abdu al-Qādir Syaibah dalam *Imtā' al-'Uqūl bi Raudāh al-'Usūl*,²² begitupun dengan Imam al-Jaizānī dalam *Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*²³ terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Al-Maṣalāḥ al-mu'tabarāh* yaitu maslahat yang telah disebutkan pensyariaan hukumnya dari Al-Quran ataupun hadis.²⁴ Sebagaimana pengharaman khamar untuk menjaga akal manusia, sehingga diharamkan setiap makanan ataupun minuman yang memabukkan dengan tujuan yang sama yaitu menjaga akal manusia.²⁵
- Al-Maṣalāḥ al-mulghah* yaitu maslahat yang ditolak atau dibatalkan hukumnya oleh syariat, sebagaimana pendapat beberapa ulama tentang hukum kafarat bagi penguasa/sultan yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan ramadan adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena memerdekakan seorang budak bagi penguasa adalah suatu hal yang mudah baginya, dikarenakan banyaknya harta yang dia miliki. Pendapat ini bertentangan dengan nas syariat, karena kafarat adalah bentuk hukuman yang dilaksanakan secara berurut. Maka dari itu ulama usul

²⁰Misran, "Al-Maṣalāḥ Al-Mursalāh Suatu Metodologi Alternatif Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer" *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2016): h. 9.

²¹Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, h. 173.

²²'Abd Al-Qādir Syaibah al-Ḥamdi, *Imtā' al-'Uqūl bi Raudāh Al-'Usūl* (Cet.III; Riyadh: t.p., 1435 H/2014 H), h. 71.

²³Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jaizānī, *Ma'ālim Usūl Al-Fiqh 'Inda Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jamā'ah*, h. 235.

²⁴ Muhammad bin Alī bin Muhammad Al-Syaukānī, *Al-Fathu Al-Rabānī min Fatāwā Al-Imām Al-Syaukānī*, Juz 8 (Yaman: Maktabah Al-Jail Al-Jadīd, 1432 H/2011 M), h. 29.

²⁵ Abdu al-Qādir Syaibah al-Ḥamdi, *Imtā' al-'Uqūl bi Raudāh al-'Usūl*, h. 71.

fikih memandang bahwa mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut atas memerdekakan seorang budak adalah maslahat yang batal dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah.²⁶

- c. *Al-Maşlahah al-maskūt* ini adalah *al-maşlahah al-mursalah* di kalangan ulama usul fikih. *Al-Maşlahah al-maskūt* adalah maslahat yang belum ditetapkan pembolehan dan penolakan hukumnya oleh nas syariat, yaitu maslahat yang belum dijelaskan bahwa dia sesuai dengan syariat ataupun menyelisihinya. Ulama berbeda pendapat atas pembolehan metode ini. Imam Malik menyebutnya dengan *al-maşāliḥ al-mursalah*, Imam Haramain menyebutnya dengan *al-istidlāl*, adapun al-Gazālī menyebutnya dengan *al-istiṣlāḥ*, sedangkan sebagian dari ahli usul fikih menyebutnya dengan *al-munāsib al-mursal al-malāim*.²⁷

3. *Al-Maşlahah* dari segi prioritas penggunaannya dalam syariat

Para ulama membagi *al-maşlahah* berdasarkan prioritas penggunaannya dalam syariat menjadi tiga yaitu, *al-maşlahah al-ḍarūriyāt*, *al-maşlahah al-ḥājjiyāt*, dan *al-maşlahah al-taḥsīnāt*, serta sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*.²⁸ Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- a. *Al-Maşlahah al-ḍarūriyāt* disebut juga dengan *dār al-mafāsīd*²⁹, yaitu maslahat yang menjadi kebutuhan pokok (primer) untuk tercapainya kemaslahatan agama dan dunia.³⁰ Maslahat ini terkandung dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima maslahat ini menjadi patokan hukum bagi syariat, maka dari itu kelima hukum tersebut disebut dengan *al-ḍarūriyāt al-khamsa* atau *maqāsid al-syarī'ah*.³¹
- b. *Al-Maşlahah al-ḥājjiyāt*, disebut dengan *dār al-mafāsīd*³² adalah maslahat yang menjadi kebutuhan manusia tapi belum sampai pada derajat *ḍarūrī* (kebutuhan pokok).³³ Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang menjadi keringanan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mendapatkan sebuah manfaat,³⁴
- c. *Al-Maşlahah al-taḥsīnāt*, disebut juga dengan *al-kamāliyyāt* adalah maslahat yang berkaitan dengan *murū'ah* (estetika/kehormatan), yakni maslahat yang berkaitan erat dengan adat dan akhlak yang mulia. Apabila maslahat ini tidak ada, maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, sebagaimana *al-maşlahah al-ḍarūriyāt*, dan tidak pula terjadi kesulitan sebagaimana *al-ḥājjiyāt*.³⁵

²⁶Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfa*, h. 174.

²⁷Abdu al-Rahmān, *al-Maşāliḥ al-Mursalah wa Aṣaruha fī al-Mu'amalāt* (Cet. I; Saudi Arabia: Dār Kanūzu Isybīliyyā, 1431 H/2010 M), h. 108.

²⁸Zaid bin Muhammad al-Rammānī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmīyah*, h. 43.

²⁹Muhammad al-Amīn bin Muhammad al-Muktār, *Muḥakkirah Usūl al-Fiqh 'Alā Rauḍah al-Nāzir wa Junnatu al-Manāzir* (Cet. I; Kairo: al-Dār al-'Ilmiyah, 1436 H/2015 M), h. 205.

³⁰Abu Ishāq Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 18.

³¹Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 236.

³²Muhammad al-Amīn bin Muhammad Al-Muktār, *Muḥakkirah Usūl al-Fiqh 'alā Rauḍah Al-Nāzir wa Junnatu Al-Manāzir*, h. 205.

³³Abdu Al-Qādir Syaibah Al-Ḥamdī, *Imtā' Al-'Uqūl bi Rauḍah Al-Usūl*, h.72.

³⁴Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jaizānī, *Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 237.

³⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 1023.

C. Pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang Kedudukan Al-maṣlaḥah Al-mursalāh sebagai Sumber Hukum

Imam al-Syāfi'ī pada asalnya tidak menjadikan *al-maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai sumber hukum. Setelah mengkaji pembahasan tentang *al-maṣlaḥah al-mursalāh* serta *usūl* Imam al-syāfi'ī beliau tidak memasukkannya sebagai *usūl* pengambilan syariat Islam. Sebagaimana perkataan Imam 'Alī bin Muḥammad al-Āmidī, dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*,

اتَّفَقَ الْمُفْهَمَاءُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى امْتِنَاعِ التَّمَسُّكِ بِهِ، وَهُوَ الْحَقُّ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقُولُ بِهِ مَعَ انْكَارِ أَصْحَابِهِ لِذَلِكَ عَنْهُ، وَلَعَلَّ النَّقْلَ إِنْ صَحَّ عَنْهُ فَأَلَّا شَبَّهُهُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ فِي كُلِّ مَصْلَحَةٍ، بَلْ فِيمَا كَانَ مِنَ الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ الْحَاصِلَةِ قَطْعًا، لَا فِيمَا كَانَ مِنَ الْمَصَالِحِ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ وَلَا كُلِّيٍّ، وَلَا وَفُوعُهُ قَطْعِيٌّ.³⁶

Artinya:

Para *Fuqaha* berbeda pendapat atas hukum *al-maṣlaḥah al-mursalāh*, Ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanafiyah* bersepakat untuk tidak menjadikannya sebagai hujah atau sumber hukum, ini merupakan pendapat yang benar. Adapun Imam Malik berpendapat boleh berhujah dengan *al-maṣlaḥah al-mursalāh*, dengan menyelisihi pendapat sahabat-sahabatnya. Kemungkinan jika benar beliau membolehkannya, Imam Malik tidak menjadikan setiap masalah sebagai hujah, akan tetapi pada *al-maṣāliḥ al-darūrī*, *kulliyah*, *qaṭ'iyah*³⁷ dan tidak pada masalah yang tidak mengandung ketiga masalah tersebut.

Berdasarkan perkataan tersebut Imam al-Āmidī menganggap bahwa Imam al-Syāfi'ī menolak *al-maṣlaḥah al-mursalāh* secara mutlak karena beliau tidak memasukkannya dalam *usūl* yang beliau sebutkan. Sebagaimana perkataan Imām al-Syāfi'ī:

أَنَّ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلٌّ وَلَا حَرْمٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَيْرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ.³⁸

Artinya:

Tidaklah seseorang menghalalkan atau mengharamkan suatu hal kecuali dengan ilmu. Ilmu adalah apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an, sunah, *Ijmā'* serta kias.

Walaupun demikian beberapa ulama mazhab Syāfi'ī menganggap bahwa Imam al-Syāfi'ī tidak menolak hal tersebut secara mutlak. Sebagaimana Imam al-Gazālī memasukkan *al-maṣlaḥah al-mursalāh* dalam kitab usul fikih karya beliau yang merupakan salah satu kitab usul fikih mu'tamad pada mazhab Syāfi'ī.

³⁶Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4 (Cet. II; Damaskus: al-Maktabah al-Islāmī, 1431 H/2010 M), h. 160.

³⁷*Maṣlaḥah Darūrī* adalah adalah apa yang menjadi masalah atas agama, akal, jiwa, harta, dan nasab. *Kulliyah* adalah yang menjadi kebutuhan untuk mendapatkan manfaat bagi kaum muslimin secara umum. *Qaṭ'iyah* adalah apa yang menjadi sebab didapatkannya sebuah masalah atau manfaat. **Lihat:** 'Alī bin 'Abdu al-Kāfi al-Subkī, *al-Ibhāj fī Syarhi al-Manāḥij*, Juz 3, h. 178.

³⁸Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 39.

Demikian pula dengan Imam al-Nawawī tidak menuliskan kitab usul fikih, akan tetapi beliau menulis sebuah kitab fikih yang mana beliau menjelaskan setiap persoalan beserta dengan metode istinbatnya. Pada kitabnya *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab* salah satu persoalan yang beliau menjelaskan metode istinbatnya berdasarkan *al-maṣlaḥah* adalah permasalahan muazin.

Jika ada seseorang yang secara sukarela menjadi muazin dan tidak diberikan gaji dari baitulmal, karena harta adalah sebuah maslahat. Jika tidak ada yang sukarela menjadi muazin maka boleh diberikan gaji dari baitulmal. Hal ini diperbolehkan karena terdapat maslahat. Serta ini merupakan pekerjaan yang diketahui di kalangan manusia.³⁹ Sebagaimana perkataan Imam al-Syāfi'ī dalam *al-Umm*:

وَوَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ الْمُؤَدِّينَ لِيُؤَدِّتُوا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَا يَنْتَظِرُهُمْ بِالْإِقَامَةِ وَأَنْ يَأْمُرَهُمْ فَيَقِيمُوا فِي الْوَقْتِ وَأُحِبُّ أَنْ يُؤَدِّنَ مُؤَدِّنٌ بَعْدَ مُؤَدِّنٍ وَلَا يُؤَدِّنَ جَمَاعَةً مَعًا. وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا كَبِيرًا لَهُ مُؤَدِّنُونَ عَدَدٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي كُلِّ مَنَارَةٍ لَهُ مُؤَدِّنٌ فَيَسْمَعُ مَنْ يَلِيهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَدِّنُونَ مُتَطَوِّعِينَ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْزُقَهُمْ وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يُؤَدِّنُ لَهُ مُتَطَوِّعًا مِمَّنْ لَهُ أَمَانَةٌ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَهُمْ مِنْ مَالِهِ وَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا يَبْلَدُ كَثِيرِ الْأَهْلِ يَعُورُهُ أَنْ يَجِدَ مُؤَدِّنًا أَمِينًا لَا يَمَّا يُؤَدِّنُ مُتَطَوِّعًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْزُقَ مُؤَدِّنًا وَلَا يَرْزُقَهُ إِلَّا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ سَهْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْقِيَاءِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّهِ مَالِكًا⁴⁰

Artinya:

Saya lebih menyukai kalau para muazin itu adalah orang-orang yang sukarela dalam melakukan tugasnya dan imam tidak perlu memberikan upah kepada mereka, tidak pula kepada salah seorang dari mereka selama imam masih mendapatkan orang yang mau adzan dengan sukarela serta memiliki sifat amanah (terpercaya): kecuali apabila ia memberikan upah tersebut dari harta pribadinya. Saya tidak mengetahui bahwa ada suatu negeri yang memiliki penduduk yang banyak, tetapi tidak ditemukan padanya orang yang mau menjadi muazin yang amanah (terpercaya) menekuni tugasnya serta bekerja dengan sukarela. Namun apabila ia tidak mendapatkannya juga, maka tidak mengapa ia menyewa muazin, dan imam (penguasa) tidak menafkahnya kecuali sebesar seperlima bagian dari seperlima bagian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang diambil dari harta rampasan perang. Tidak boleh bagi imam memberi upah muazin selain bagian tersebut yang diambil dari harta *fa'i* (harta yang diperoleh dari non-muslim tanpa melalui perang), karena masing-masing harta itu memiliki pemilik yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa Imam al-Nawawī begitupun Imam al-Syāfi'ī tidak menolak *al-maṣlaḥah* secara mutlak akan tetapi menggunakannya pada keadaan tertentu dengan tetap bersandarkan atas nas syariat. 'Alī bin 'Abdu al-Kāfi al-

³⁹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 3, h. 126.

⁴⁰Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 1, h. 103.

Subkī menyebutkan dalam kitabnya *al-Ibhāj fī Syarhi al-Manāhij*, bahwa ulama berbeda pendapat dalam permasalahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Salah satunya melarang secara mutlak dan ini merupakan pendapat jumhur, adapun pendapat kedua membolehkannya secara mutlak sebagaimana pendapat Imam Malik. Pendapat ketiga adalah pendapat yang beliau pilih, beliau berkata:

الثالث مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ ضَرُورِيَّةً فَطَعِيَّةً كَلْبِيَّةً اعْتَبِرَتْ وَإِنْ فَاتَ أَحَدُ هَذِهِ الثُّلُودِ الثَّلَاثَةِ لَمْ تُعْتَبَرْ وَالضَّرُورِيَّةُ مَا تَكُونُ فِي الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ أَعْيَى الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَالنَّسَبِ وَالْقَطْعِيَّةِ الَّتِي تُجْزَمُ بِحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا وَالْكَلْبِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَكُونُ مَوْجِبَةً لِفَائِدَةٍ تَعُمُّ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ.⁴¹

Artinya:

Pendapat ketiga adalah apa yang dipilih oleh penulis ('Alī bin 'Abdu al-Kāfi al-Subkī), yaitu maslahat tersebut adalah maslahat *darūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, *kulliyyah*. Jika salah satu dari ketiga ini hilang maka maslahat tersebut tidak dapat dijadikan hujah atau sumber hukum. *Darūriyyah* adalah apa yang menjadi maslahat atas agama, akal, jiwa, harta, dan nasab. *Qaṭ'iyyah* adalah apa yang menjadi sebab didaptkannya sebuah maslahat atau manfaat. Adapun *Kulliyyah* adalah yang menjadi kebutuhan untuk mendapatkan manfaat bagi kaum muslimin secara umum.

Imam al-Juwainī menjelaskan bahwa Imam al-Syāfi'ī menerima *istidlāl* (*al-maṣlaḥah al-mursalah*) yang tidak dilandasi dengan dalil nas, namun disyaratkan harus sesuai dan tidak menyelisihi nas yang ada. Imam al-Juwainī menjelaskan bolehnya mengaitkan hukum dengan maslahat yang serupa dengan hukum yang ada pada nas.⁴²

Berdasarkan beberapa perkataan Imam al-Syāfi'ī dan beberapa ulama mazhab beliau, dapat dilihat bahwa bolehnya menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan beberapa syarat, di antaranya:

1. Maslahat tersebut tidak menyelisihi dalil dari Al-Qur'an atau sunah
2. Maslahat merupakan *darūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, *kulliyyah*.
3. Maslahat tersebut dikiaskan dengan dalil dari Al-Quran ataupun sunah.

D. Analisis Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum dalam Kitab al-Risālah

Al-Maṣlaḥah al-mursalah dalam kitab *al-Risālah* tidak disebutkan dengan jelas, hanya saja beberapa ulama menyamakan antara *al-istiḥsan* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Sebagian mazhab syāfi'ī memasukkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam bab kias. Imam al-Syāfi'ī memiliki pandangan yang luas tentang kias, maka kias dalam pandangan beliau meliputi *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Serta memasukkannya dalam bab ijtihad.⁴³ Sebagaimana perkataan beliau:

⁴¹'Alī bin 'Abdu al-Kāfi al-Subkī, *al-Ibhāj fī Syarhi al-Manāhij*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1404 H/1984 M), h. 178.

⁴²Nawir Yuslem, *al-Burhan fu Usūl al-Fiqh* kitab Induk Usul fikih (Cet. 1; Bandung: Citapustaka Media, 1428 H/2007 M), h. 185.

⁴³Hātim al-Hāris, "al-Maṣlaḥah al-Mursalah Mafhumuhā wa Hujiyyatuhā wa Ḍawābiḥuhā" *al-Adāb wa al-'Ulūm al-Insāniyah* 26, no. 1(2018): h. 20.

فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شيء وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل والدلائل هي القياس قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت⁴⁴

Artinya:

Adapun Al-Qur'an dan sunah menunjukkan pada hal tersebut. Jika Nabi saw. memerintahkan untuk berijtihad, maka ijtihad adalah menemukan sesuatu dan menemukan sesuatu tersebut dengan dalil-dalil, dalil-dalil tersebut adalah kias. Jadi dimana keadaan kias pada dalil? Sesuai dengan apa yang anda gambarkan.

Berdasarkan perkataan tersebut dan hasil atas analisa penulis dari kitab *al-Risālah* bahwa Imam al-Syāfi'ī menjadikan ijtihad sebagai *usūl* atau sumber hukum. Imam al-Syāfi'ī juga tidak menyebutkan *al-maṣlaḥah* dalam kitab *al-Risālah*. Akan tetapi jika ditinjau dari bab ijtihad beliau membolehkan adanya ijtihad, beliau menjelaskan bahwa seorang mujtahid harus berusaha mencari makna yang terkandung dalam kitab dan sunah dengan tepat.

Jika *al-maṣlaḥah* ditinjau dari bab ijtihad, maka dapat dipahami bahwa perkara di sekitar kita yang membutuhkan penjelasan hukum menjadi beban bagi *mujtahid* untuk memahami lebih dalam kandungan dari Al-Qur'an dan hadis. Apakah ada nas yang sesuai dengan masalah tersebut, jika ada maka pembahasan *al-maṣlaḥah* telah masuk di bab kias. Sebagaimana pendapat sebagian ulama mazhab Syāfi'ī yang memasukkan *al-maṣlaḥah al-mursalāh* dalam bab kias.

Sebagian ulama menyamakan antara *al-maṣlaḥah al-mursalāh* dengan *al-istiḥsān*. Sebelum membahas hukum *istiḥsān* dalam kitab *al-Risālah*, seyogyanya mengetahui hubungan antara *istiḥsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalāh*, di antaranya:

1. Kesamaan antara *istiḥsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalāh*

Salah satu pembagian dari *istiḥsān* adalah *al-istiḥsān al-ḍarūrī*,⁴⁵ Pembahasan ini merupakan bagian dari *pembagian al-maṣlaḥah*, yang sejalan dengan *maqāsid al-syāri'ah*.

2. Perbedaan antara *istiḥsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalāh*

Al-Maṣlaḥah tidak memiliki syarat yang berlawanan dengan nas dan tidak menyelisi nas, sedangkan *Istiḥsān* berlawanan dengan kias *zāhir* ataupun dalil sebagai bentuk penjagaan atas kemaslahatan umum.⁴⁶

Dari hasil analisa tersebut dapat dipahami bahwa *istiḥsān* menetapkan suatu hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, karena melihat ada kemaslahatan yang dibutuhkan dari berubahnya hukum tersebut meskipun menyelisihi dalil sebelumnya. Sedangkan *al-maṣlaḥah al-mursalāh* menetapkan suatu hukum yang dipandang memiliki kemaslahatan umum, yang mana hukum tersebut tidak menyelisihi dalil sebelumnya.

⁴⁴Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 517.

⁴⁵Abd al-Karim bin 'Alī bin Muḥammad Namlah, *al-Jāmi' li Masā'il Usūl al-Fiqh wa Tatbīqātuhu 'alā al-Mazhab al-Rājih* (Cet. I: Riyāḍ; Maktabah al-Rusyd, 1420 H / 2000 M), h. 384.

⁴⁶Ummu Kulṣūm bin Haud, *Baina al-Maṣāliḥ al-Mursalāh wa al-Istiḥsān*. t.t: Maktabah al-Alūkah, 2017. <https://www.alukah.net/> (30 Agustus 2023 M).

Setelah mengetahui keterkaitan antara *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *al-istiḥsān*, penulis akan sampaikan hasil analisa penulis atas pendapat Imam al-Syāfi'ī tentang *al-istiḥsān*. Dalam kitab *al-Risālah* dicantumkan bab tentang *al-istiḥsān* setelah bab *ijtihād*.

Imam al-Syāfi'ī membolehkan *ijtihād*, ketika ditanya bagaimana cara ber*ijtihād* maka beliau menjawab “Allah Swt. menciptakan akal atas setiap hamba-Nya. Melalui akal tersebut Allah Swt. akan memperlihatkan perbedaan di antara orang yang berbeda pendapat. Allah Swt. Membimbing jalan hambanya melalui nas yang ada serta petunjuk darinya”.⁴⁷

Setelah beliau membahas tentang *ijtihād* beliau ditanya tentang hukum melakukan *al-istiḥsān* tanpa disertai kias, beliau menjawab:

لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر⁴⁸

Artinya:

Menurut saya hal tersebut tidak diperbolehkan. Tidak seorangpun dari ahli ilmu yang boleh berkata demikian. Para ulama diperbolehkan mengatakan suatu hukum yang berasal dari nas adalah kewajiban untuk mengikutinya. Namun apabila tidak ditemukan nas yang menyebutkannya maka harus dengan kias atas nas yang ada.

Setelah beliau menjelaskan penolakannya atas *istiḥsān* yang tidak disertai kias. Beliau menjabarkan tentang tata cara *ijtihād* dengan menggunakan kias, serta menyebutkan beberapa contoh hukum yang ditetapkan dengan kias. Imam al-Syāfi'ī juga menyatakan bahwa *istiḥsan* adalah perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, sebagaimana perkataan beliau.

وإنما الاستحسان تلذذ⁴⁹

Artinya:

Sesungguhnya *istiḥsān* adalah mengikuti hawa nafsu (untuk bersenang-senang).

Hasil analisa penulis dari keterkaitan antara *istiḥsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, serta pendapat Imām al-Syāfi'ī tentang *istiḥsan*. Penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa *istiḥsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah* memiliki perbedaan yang sangat jelas. *Istiḥsān* mengambil hukum untuk kemaslahatan umum, dimana hukum tersebut telah dijelaskan oleh nas sebelumnya. Adapun *al-maṣlaḥah al-mursalah* menentukan hukum untuk kemaslahatan umum, yang mana hukum tersebut belum dijelaskan dari nas serta tidak ada nas yang menyelisihinya.

Pada kitab *al-Risālah* Imam al-Syāfi'ī menolak menggunakan *istiḥsān* yang tidak disertai kias, yang berarti secara tidak langsung beliau membolehkan *istiḥsān* yang disertai dengan kias. Kemiripan antara *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *istiḥsān* dan alasan penolakan beliau atas *istiḥsān* yang tidak disertai kias. Dipahami bahwa Imam al-Syāfi'ī menolak bentuk *ijtihād* hukum yang tidak berlandaskan dengan nas ataupun tidak dikias dengan nas yang ada.

Dari hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa Imam al-Syāfi'ī tidak menyebutkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang berarti beliau pada asalnya tidak mengambilnya sebagai

⁴⁷Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 514.

⁴⁸Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 516.

⁴⁹Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 519.

hujah. Akan tetapi tidak menolaknya secara mutlak karena beliau tidak menyebutkan penolakan tersebut sebagaimana beliau menyebutkan *al-Istihsān* yang tidak disertai kias sebagai bentuk penolakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan dari penelitian tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai Sumber Hukum Studi Analisis Pendapat Imam al-Syāfi'ī, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Imam al-Syāfi'ī tidak memasukkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam *usūl* mazhab beliau, akan tetapi beberapa ulama dari mazhab Syāfi'ī menganggap bahwa beliau tidak menolak *al-maṣlaḥah al-mursalah* secara mutlak. Dengan syarat masalah tersebut sesuai dan tidak menyelisihi nas syariat. Sebagaimana Imām al-Syāfi'ī membolehkan kias selama tetap berlandaskan dengan nas syariat. Imam al-Syāfi'ī tidak menyinggung sama sekali pada kitab beliau tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan tidak memasukkannya pada bab kias sebagaimana yang dilakukan oleh ulama mazhab beliau. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan penolakannya sebagaimana beliau menyebut *al-Istihsān* yang tidak disertai kias dalam kitabnya sebagai penjelasan bahwa beliau menolak sumber atau metode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Afrīqī, Jamāluddīn Muḥammad bin Mukram Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 2, Cet. III; t.t.: Nasyru Adabi al-Ḥauzah, 1405 H/1984 M.
- Akbar, Khaerul, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, Makassar: STIBA Publishing, 2022.
- Al-Āmidī, 'Alī bin Muḥammad . *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, Juz 4. Cet. II; Damaskus: al-Maktabah al-Islāmī, 1431 H/2010 M.
- Aris, "Pemikiran Imam Syāfi'ī tentang Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Sumber Hukum" *Hukum Diktum* 11, no. 11 (2013).
- Aziz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Asaruhā fī al-Mu'āmalāt*. Cet. I; Saudi Arabiyah: Dār Kanūz Isybīlīyā, 1431 H/2010 M.
- Al-Gazālī, Abu Hamid Muḥammad bin Muḥammad , *al-Mustasfa min al-'Ilmī al-Uṣūl*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1413 H/1993 M.
- Al-Ḥamdī, Abdu Al-Qādir Syaibah, *Imtā' Al-'Uqūl bi Rauḍah Al-Uṣūl*, Cet. III; Madinah: t.p., 1435 H/ 2014 M.
- Ibnu Salamah. Abi Islam Muṣṭhafa bin Muḥammad . *al-Ta'sīs fī Uṣūl al-Fiqh 'ala Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. V; Kairo: al-Maktabah al-Islāmīyah, 1428 H/2007 M.
- Jaizānī, Muḥammad bin Husain bin Hasan, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahlu Sunnah wa al-Jamā'ah*, Cet. XII; Damam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1439 H/2018 M.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Cet. VII; t.t.: Maktabah al-Da'wah, 1431 H/ 2010 M.
- Al-Mukhtār, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad . *Muzakkirah Uṣūl al-Fiqh 'alā Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*. Cet. I; Kairo: al-Dār al-'Ilmiyah, 1436 H/2015 M.

- Mustafā, Ibrāhīm, dkk., *Mu'jam Al-Wasīf*, t.t.: Dār al-Da'wah, 1431 H/2010 M.
- Al-Namlah, Abdu al-Karīm bin 'Alī bin Muhammad, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl Al-Fiqh Al-Muqāran*, Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Al-Rusyd, 1420 H/ 1999 M.
- Al-Rahmān, Abdu, *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh wa Aṣaruha fī al-Mu'amalāt*, Cet. I; Saudi Arabia: Dār Kanūzu Isybīliyyā, 1431 H/2010 M.
- Al-Rammānī. Zaid bin Muḥammad , *Maqāsīd al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Gaiṣ, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Subkī, 'Alī bin 'Abdu al-Kāfī. *al-Ibhāj fī Syarhi al-Manāhij*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1404 H/1984 M.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya, 2011.
- Al-Syātībī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad . *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2. Cet. I; t.t.: Dār 'Affān, 1417 H/1997 M.
- xAl-Syaukanī, Muḥammad bin Ali bin Abdullah. *al-Fathu al-Rabānī min Fatāwā al-Imām al-Syaukānī*, Juz 8. Yaman: Maktabah al-Jail al-Jadīd, 1432 H/2011 M.
- Umar, Mukhsin Nyak, *al-Maṣlahah al-Mursalāh: Kajian atas Relesansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I; Banda Aceh: Turats 1438 H/ 2017 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* . Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1406 H/1986 M.

Jurnal dan Skripsi

- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “*al-Maṣlahah al-Mursalāh* dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no.1 (2018): h. 2.
- Misran, “*al-maṣlahah al-mursalāh* Suatu Metodologi Alternatif Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2016): h. 1-25.
- Purwanto, “Konsep Maṣlahah Mursalāh dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin al-Ṭufī”, *Skripsi*, Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2018.
- Sucipto, Mohammad Hadi. “Perdebatan *Maṣlahah Mursalāh* dalam Kitab-Kitab Imam al-Ghazali”. *Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): h. 2-17.